



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai penghargaan atas prestasi kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kinerja yang dicapai.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. PNS Pusat adalah PNS Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
8. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Sasaran Kerja Pegawai bulanan yang selanjutnya disingkat SKP-B adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam 1 (satu) masa kinerja.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.
14. Penilaian Kinerja adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
15. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.

BAB II

PENERIMA TKD

Pasal 2

- (1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS penerima TKD adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (3) PNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TKD setelah 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (5) PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- (6) PNS berprofesi Guru yang belum bersertifikasi dan PNS yang bertugas di sekolah selain guru.

BAB III

PENETAPAN TARGET DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Penetapan Target

Pasal 3

- (1) Kinerja dinilai berdasarkan capaian kinerja dalam satu masa penilaian yang meliputi aspek:
 - a. Integritas;
 - b. Etos Kerja; dan
 - c. Gotong royong.
- (2) Aspek integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari aspek disiplin, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, SPT Tahunan, Temuan Pemeriksaan dan Pakta Etika Perilaku PNS
- (3) Aspek etos kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari aspek capaian SKP dan capaian berdasarkan aplikasi E-Monev.
- (4) Aspek gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari kegiatan kebersamaan dan apel pagi/sore.

Pasal 4

- (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan SKPD, standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.
- (2) SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung/pejabat penilai.
- (4) Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaian kinerja.
- (6) Jika terdapat alasan-alasan yang cukup, SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum penilaian kinerja dilakukan.
- (7) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib melampirkan bukti-bukti alasan serta SKP sebelumnya.
- (8) Tata cara penginputan dan penilaian SKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja ASN Berbasis Revolusi Mental Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
- (2) Formulir Penetapan SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penilaian TKD

Pasal 6

TKD dibayarkan berdasarkan hasil penilaian terhadap semua unsur kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja ASN Berbasis Revolusi Mental Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB IV

KATEGORI DAN TARIF DASAR TKD



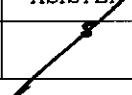
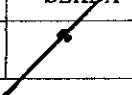

Pasal 7

TKD digolongkan dalam klasifikasi yang meliputi:

- a. TKD Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. TKD Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. TKD Pejabat Administrator;
- d. TKD Pejabat Pengawas dan Koordinator UPTD Samsat;
- e. TKD Pejabat Pelaksana;
- f. TKD Pejabat Fungsional; dan
- g. TKD bagi Guru yang belum bersertifikasi dan PNS yang bertugas di sekolah selain guru.

Pasal 8

- (1) Tarif Dasar TKD pada setiap jenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Tarif Dasar TKD untuk Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Terhadap PNS yang bekerja di Badan Penghubung Jakarta ditambahkan 30% (tiga puluh persen) dan Sub Bidang Penghubung Makassar ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) TKD bagi PNS non struktural yang memiliki pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVc ke atas dengan besaran Rp4.000.000,00.
- (5) Daftar nama-nama penerima TKD non struktural yang memiliki pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVc ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB V

TKD BAGI PNS YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN

Pasal 9






- (1) Bagi PNS atau CPNS yang mengikuti tugas belajar, kursus LEMHANAS, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan diberikan TKD.
- (2) Bagi PNS atau CPNS yang mengikuti tugas belajar dapat diberikan TKD sebesar 20% dari tarif dasar.
- (3) Bagi PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengikuti Diklat selama satu masa penilaian kinerja wajib menyusun SKP yang disetujui oleh atasan langsung/pejabat dengan melampirkan daftar hadir/perilaku selama mengikuti diklat serta persetujuan keterangan dari pelaksana diklat.
- (4) Persetujuan/Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan diklat.

BAB VI

PERHITUNGAN JUMLAH TKD

Pasal 10

- (1) Perhitungan pencapaian kinerja untuk masing-masing pejabat dan pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jumlah TKD yang dibayarkan setiap masa kinerja sebagaimana terdapat pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini, adalah Tarif TKD dikali dengan total hasil penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja ASN Berbasis Revolusi Mental Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dikurangi dengan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (3) Jumlah TKD yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21 sebagaimana terdapat pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TKD

Pasal 11

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (3) Pembayaran TKD untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII
TKD KE-TIGABELAS






Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi kinerja dapat diberikan TKD ke-tigabelas.
- (2) Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Gubernur Gorontalo untuk memberikan TKD ke-tigabelas.

BAB IX
SANKSI

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan dan atau tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan:
 1. Teguran lisan, pengurangan sebesar 20% dari TKD selama 1 (satu) masa kinerja penilaian;
 2. Teguran tertulis, pengurangan sebesar 30% dari TKD selama 2 (dua) masa kinerja penilaian;
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, pengurangan sebesar 40% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian.
 - b. Hukuman Disiplin Sedang:
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, pengurangan sebesar 75% dari TKD selama 2 (dua) masa kinerja penilaian;






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, pengurangan sebesar 100% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian;
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pengurangan sebesar 100% dari TKD selama 4 (empat) masa kinerja penilaian.
- c. Hukuman Disiplin Berat:
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun, pengurangan sebesar 50% dari TKD selama 6 (enam) masa kinerja penilaian;
 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pengurangan sebesar 50% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian; dan
 3. Pembebasan dalam jabatan, pengurangan sebesar 50% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian.
- (2) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan wajib menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman kepada yang bersangkutan.
- (3) Gubernur dapat memberikan sanksi sebagaimana pada Pasal (1) huruf a angka 3 bagi PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kenerja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kenerja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

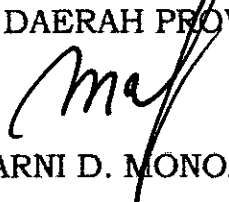
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

1. LAMPIRAN I : FORMULIR PENETAPAN SASARAN KERJA PEGAWAI
2. LAMPIRAN II : TARIF DASAR TKD
3. LAMPIRAN III : TARIF DASAR TKD JABATAN FUNGSIONAL
4. LAMPIRAN IV : PERHITUNGAN JUMLAH TKD
5. LAMPIRAN V : PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 (PPh 21)
6. LAMPIRAN VI : JUMLAH TKD YANG DIBAYARKAN

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 JANUARI 2018
 TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

FORMULIR PENETAPAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai Yang Dinilai : Rian M. Laya
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Anggaran Area I Bidang Anggaran
 Masa Penilaian (Bulan) : Januari 2018

No.	Kegiatan Tugas Jabatan	AK*)	Target Hasil	
			Vol.	Satuan
A	Pelaksanaan Tugas Manajerial			
1	Merencanakan kegiatan bulanan			
	Penetapan anggaran kas kegiatan pada seksi Anggaran Area I	0	2	Dokumen
2	Memeriksa dan mengoreksi tugas bawahan	0	15	Dokumen
3	Memberi disposisi terhadap naskah dinas	0	15	Dokumen
4	Memberi tanda tangan/paraf terhadap naskah dinas	0	35	Dokumen
5	Membuat konsep telaah sesuai disposisi pimpinan	0	15	Dokumen
B	Pelaksanaan Program/Kegiatan			
1	Surat Penyediaan Dana (SPD)			
a	Menerima surat permohonan SKPD	0	15	Dokumen
b	Memverifikasi surat permohonan SKPD	0	15	Dokumen
c	Koordinasi dengan BUD Kustodian	0	15	Dokumen
d	Mengkoordinir penginputan penyediaan dana dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
e	Penyampaian ketersediaan dana dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
f	Pelaporan dan evaluasi	0	15	Dokumen
2	SIMDA			
a	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengembang Aplikasi SIMDA	0	1	Dokumen
b	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengembang Aplikasi SIM-PD	0	15	Dokumen
c	Memberi disposisi penginputan persetujuan pergeseran anggaran dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
d	Koordinasi Penginputan RKA-SKPD	0	15	Dokumen

Gorontalo, 2018

Pejabat Penilai,

Pegawai Yang Dinilai,

DANIAL IBRAHIM, SE., MM.
 NIP. 19731102 200212 1 004

RIAN M. LAYA
 NIP. 19760103 200212 1 006

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

TARIF DASAR TKD

NO	KATEGORI JABATAN	TARIF (RP)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	30,000,000.00
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten	19,000,000.00
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD)	17,500,000.00
4	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli)	15,000,000.00
5	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Biro)	15,000,000.00
6	Jabatan Administrator Kepala Badan Penghubung	8,500,000.00
7	Jabatan Administrator	7,500,000.00
8	Jabatan Pengawas dan Koordinator Samsat	5,000,000.00
9	Jabatan Pelaksana	2,500,000.00
10	Guru yang belum bersertifikasi	1,000,000.00
11	PNS yang bertugas di sekolah selain Guru	750,000.00

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


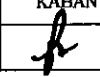
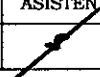


NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : JANUARI 2018

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

TARIF DASAR TKD JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan /Tingkat Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kinerja Daerah 2018
Widyaiswara			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,900,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,900,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,850,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 11,000,000
Perencana			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,900,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,975,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,050,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 11,000,000
Analisis Kepegawaian			
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp 3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 4,000,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,150,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,150,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 9,800,000
Auditor Kepegawaian			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,000,000
Auditor			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,500,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,000,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 11,000,000
Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah /Pengawas Pemerintahan (P2UPD)			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,000,000
Pengawas Sekolah			
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,600,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,000,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,500,000
Pamong Belajar			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,800,000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,550,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,000,000

Penera

Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,000,000

Penguji Mutu Barang

Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,500,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,000,000

Instruktur

Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,000,000

Mediator Hubungan Industrial


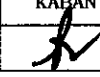



Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,000,000

Penyuluh Pertanian



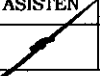

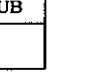
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,900,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,250,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,500,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,250,000
	Utama	V/d – V/e	Rp	9,000,000

Pengawas Benih Tanaman

Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,850,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,150,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,100,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,500,000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



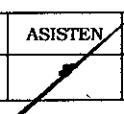
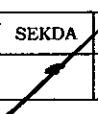
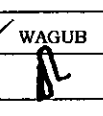
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,850,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,150,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,300,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,000,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,500,000
Penyuluh Perikanan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,750,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	7,500,000
Pengawas Perikanan				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,200,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	7,250,000
Inspektur Tambang				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,000,000
Penyuluh Kehutanan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,850,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,150,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,150,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,250,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	8,500,000
Polisi Kehutanan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,850,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,150,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,400,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,250,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,350,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,500,000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Polisi Pamong Praja (Pol PP)				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,200,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,500,000
Medik Veteriner				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,600,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	8,500,000
Paramedik Veteriner				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,850,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,250,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,500,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,250,000
Pengawas Bibit Ternak				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,100,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,650,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,300,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,500,000
Pengawas Mutu Pakan Ternak				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,150,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,700,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,700,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,300,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,500,000
Pustakawan				
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	4,000,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,900,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	8,000,000
Arsiparis				
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,150,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,600,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,000,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	7,000,000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Dokter				
Ahli	Pertama	III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	10,000,000
Perawat				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,150,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,100,000
Bidan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,150,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,100,000
Pembimbing Kesehatan Kerja				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7,100,000
Epidemiolog Kesehatan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,850,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,500,000
Nutrisionis				
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,150,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,900,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,850,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,500,000
Pranata Laboratorium Kesehatan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3,150,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4,900,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,850,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,500,000

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pranata Komputer				
Terampil	Pemula	IV/a	Rp	2.750.000
	Pelaksana	IV/b – IV/c – IV/d	Rp	3.000.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3.150.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.650.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3.900.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4.800.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6.500.000
	Utama	V/d – V/e	Rp	10.000.000
Pranata Hubungan Masyarakat				
Terampil	Pemula	IV/a	Rp	2.750.000
	Pelaksana	IV/b – IV/c – IV/d	Rp	3.000.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3.250.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.500.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4.000.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4.500.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6.000.000
Penerjemah				
Terampil	Pemula	IV/a	Rp	3.000.000
	Pelaksana	IV/b – IV/c – IV/d	Rp	3.250.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3.500.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.750.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4.000.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	5.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7.500.000
Apoteker				
Ahli	Pertama	III/b	Rp	3.900.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4.975.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	7.015.000
	Utama	IV/d – V/e	Rp	7.900.000
Asisten Apoteker				
Terampil	Pelaksana Pemula	IV/a	Rp	2.685.000
	Pelaksana	IV/b – IV/c – IV/d	Rp	2.840.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3.000.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.700.000
Perawat Gigi				
Terampil	Pelaksana Pemula	IV/a	Rp	2.685.000
	Pelaksana	IV/b – IV/c – IV/d	Rp	2.840.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3.000.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.700.000

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN KINERJA

NO.	NAMA	INTEGRITAS (40%)					NILAI INTEGRITAS	ETOS KERJA (50%)		GOTONG ROYONG (10%)		NILAI GOTONG ROYONG	TOTAL KINERJA
		DISIPLIN	LHKPN/ LHKSN	SPT	TEMUAN	ETIKA		SKP/E-MONEV	NILAI ETOS KERJA	KERJA SAMA	APEL KERJA		
1	HUZAIRIN	75	10	5	5	5	40	80	40	50	50	10	90
2	DANIAL	60	10	5	5	5	34	70	35	50	50	10	79
3	FERRY	75	0	5	5	5	36	70	35	50	50	10	81
4	EVI	75	0	5	5	5	36	70	35	50	50	10	81

GUBERNUR GORONTALO

 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

JUMLAH TKD YANG DIBAYARKAN

Nama SKPD :

Masa Penilaian :

No	Nama	Jabatan	Eselon	NPWP	Dasar TKD (Rp)	Nilai Kinerja (%)	Jumlah TKD (Rp)	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh (Rp)	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)/100	9 (% pot x 8)	10 (8 - 9)	11	12 (10 - 11)	13
1	Danial	Administrator	III	XX.XXX.XXX.X-822.000	5.600.000	95,12	5.326.720	-	5.326.720	799.008	4.527.712	

Menyetujui,

Kepala


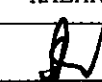
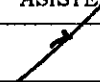


Bendahara Pengeluaran

()

()

GUBERNUR GORONTALO,

 RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)**

NO	URAIAN PENGHASILAN	BESARAN PPh 21	URAIAN PERHITUNGAN
1.	Gol. I dan II	0 %	<p><u>Catatan:</u></p> <p>1. Dasar pengenaan PPh adalah jumlah TKD yang terdapat pada kolom 10 Lampiran VI</p> <p>2. Contoh perhitungan</p> <p>a. Nona (Gol. II) menerima TKD = Rp2.450.000,- PPh 21 0 % x Rp. 2.450.000.- = Rp0,-</p> <p>b. Surianto, Ess. IV (Gol. III) menerima TKD = Rp5.000.000,- PPh 21 5 % x Rp. 5.000.000 = Rp250.000,-</p> <p>c. Danial, Ess. IIIA (Gol. IV) menerima TKD = Rp7.500.000,- PPh 21 15 % x Rp. 7.500.000 = Rp1.125.000,-</p> <p>d. Huzairin, Ess. IIA (Gol. IV) menerima TKD = Rp17.500.000,- PPh 21 15 % x Rp. 17.500.000 = Rp2.625.000,-</p>
2.	Gol. III	5 %	
3.	Gol. IV	15 %	

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
